

Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Mande

Nur Najmah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara/Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Alamat : Jl. Pierre Tandean, Kel. Mande, Kec. Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis : najmahnuhu@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine: Performance of Working Groups (Pokja I, Pokja II, Pokja III, and Pokja IV) PKK Mande Village in implementing ten work programs related to women's empowerment. The type of research is descriptive quantitative. Data collection techniques used, namely: questionnaires, documentation, and interviews. The population in the study were the administrators and members of the PKK Mande Village, totaling 27 people, consisting of 14 administrators and 21 members. The sampling technique in this study used saturated sampling technique. The sample in this study were administrators and members of the PKK Mande Village, totaling 35 people. Data analysis techniques used in this study using descriptive statistical methods. The results of the research obtained, namely: 1) The performance of the Working Group (Pokja I) in implementing the work program of appreciation and practice of Pancasila and gotong-royong can be done very well. 2) The performance of Pokja II PKK Mande Village in implementing the skills education work program is very well implemented and the cooperative life development work program cannot be implemented. 3) The performance of Pokja III PKK Mande Village in implementing the food work program is very well implemented while the clothing and household management work programs are less well implemented.*

Keywords: *Performance, Working Group, Work Program, Women's Empowerment*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Kinerja Kelompok Kerja (Pokja I, Pokja II, Pokja III, dan Pokja IV) PKK Kelurahan Mande dalam mengimplementasikan sepuluh program kerja yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Populasi dalam penelitian adalah pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mande yang berjumlah sebanyak 27 orang, terdiri dari pengurus sebanyak 14 orang dan anggota sebanyak 21 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mande yang berjumlah 35 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Kinerja Kelompok Kerja (Pokja I) dalam mengimplementasi program kerja penghayatan dan pengamalan pancasila serta gotong-royong dapat terlaksana dengan sangat baik. 2) Kinerja Pokja II PKK Kelurahan Mande dalam implementasi program kerja pendidikan keterampilan terlaksana dengan sangat baik dan program kerja pengembangan hidup berkerjasama yang tidak dapat terlaksana. 3) Kinerja Pokja III PKK Kelurahan Mande dalam implementasi program kerja pangan terlaksana dengan sangat baik sedangkan program kerja sandang dan tata laksana rumah tangga kurang terlaksana.

Kata kunci: Kinerja, Kelompok Kerja, Program Kerja, Pemberdayaan Perempuan

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pembangunan di berbagai tingkat mulai tingkatan pusat sampai dengan tingkatan Kabupaten atau Kota masih belum menempatkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kegiatan pembangunannya. Padahal secara idealnya pemerintah telah berupaya meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, Saat ini telah berkembang banyak organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan, terutama dalam memberdayakan perempuan sebagai subjek pembangunan nasional. Salah satunya, yaitu

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berada pada berbagai tingkatan kepengurusan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan atau desa. Sebagian orang berpikiran kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan pengurus PKK hanya melakukan kegiatan seperti masak-masak dan gosip, persepsi inilah yang sering muncul di dalam pemikiran para suami sehingga tidak jarang para suami melarang istrinya untuk mengikuti kegiatan PKK. Pada hal dalam praktek dan kenyataannya kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi PKK memberikan peran besar dalam mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri perempuan, melalui berbagai macam program kerjanya.

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta memiliki kesadaran hukum dan lingkungan (Tim Penggerak PKK, 2020). Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama Organisasi PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung berbagai macam pemerintah. Berawal dari keluarga yang sejahtera, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Kesejahteraan keluarga menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kelurahan Mande merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Mpunda Kota Bima. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Kelurahan Mande berjumlah sebanyak 6326 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3839 jiwa (BPS Kota Bima, 2020). Sama seperti kelurahan lain di Kota Bima yang sedang mengalami perkembangan sangat cepat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi informasi. Perkembangan dari berbagai aspek tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan sosial, mulai dari ruang lingkup yang paling kecil dan sederhana, yaitu ruang lingkup keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat menjadi indikator dasar keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang diwadahi oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jumlah penduduk perempuan di Kelurahan Mande yang mencapai 3839 jiwa atau 61% dari total keseluruhan jumlah penduduk sebesar 6326 jiwa. Hal ini menjadi suatu potensi yang harus diberdayakan dalam menunjang pembangunan. Terdapat

sepuluh program pokok yang menjadi rencana pemberdayaan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu: 1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2) Gotong-royong; 3) Pendidikan dan keterampilan; 4) Pengembangan hidup berkoperasi; 5) Sandang; 6) Pangan; 7) Perumahan dan tata rumah tangga; 8) Kesehatan; 9) Kelestarian lingkungan hidup; dan 10) Perencanaan hidup sehat (Thalib, 2018 : 72). Melalui penerapan segenap program yang direncanakan oleh TP PKK diharapkan para perempuan yang tergabung dalam kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran dalam menggali potensi diri sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan saja, akan tetapi perempuan harus ikut mengambil peran dalam mewujudkan keluarga sejahtera, maju, dan mandiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan menggambarkan kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Mande dalam melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan. Kinerja tersebut berkaitan dengan hasil pelaksanaan tugas pokok dan pencapaian tujuan Organisasi PKK.

Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi (Bastian, 2016 : 74). Selanjutnya, menurut Pasolong (2018 : 176) mendefinisikan bahwa kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus dalam mencapai kebutuhannya secara efektif. Melalui beberapa definisi tersebut kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai hasil dari aktivitas organisasi, kinerja organisasi harus dilakukan pengukuran untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan telah ditetapkannya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tujuan dasar penelitian untuk menggambarkan Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Mande dalam pemberdayaan perempuan, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Mande” di karenakan dalam dua tahun terakhir kinerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak terlaksana dengan baik atau kondisi dimana tidak ada aktifitas yang dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian dan Konsep Kinerja Organisasi

Menurut Mahmudi (2018 : 15) mendefinisikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan masyarakat, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedangkan Wahdani (2018 : 7) mengatakan bahwa kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan atau tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, baik secara individu maupun dengan bekerja sama Menurut Mahmudi (2018 : 15) mendefinisikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan masyarakat, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedangkan Wahdani (2018 : 7) mengatakan bahwa kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan atau tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, baik secara individu maupun dengan bekerja sama.

Hasil dari pekerjaan yang dicapai dengan cara bekerja sama disebut sebagai kinerja organisasi. Sebagaimana pendapat dari Bastian (2016 : 74) mengatakan bahwa, kinerja organisasi adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Menurut Pasolong (2018 : 176) mengemukakan bahwa, kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus dalam mencapai kebutuhannya secara efektif. Sama halnya dengan pendapat dari Dewi (2019 : 84) mengatakan kinerja organisasi merupakan cerminan dari berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kinerja merupakan aspek yang sangat penting yang harus diinformasikan kepada pihak yang berwenang seperti manajer, kepala divisi, pemilik perusahaan dan pihak tertentu lainnya.

Sedangkan menurut Mulyadi (2017 : 37) mengatakan bahwa, kinerja organisasi adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, maka kinerja organisasi dapat diartikan sebagai ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan strategi yang tepat sasaran disetiap unit kerjanya dan harus diinformasikan

kepada pihak yang berwenang sebagai bahan masukan dalam menetapkan kebijakan strategis organisasi selanjutnya.

Pengukuran Kinerja Organisasi

Informasi kinerja organisasi sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan suatu organisasi. Informasi tentang kinerja organisasi yang lengkap (komprehensif) dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan pengukuran yang bersifat objektif. Menurut Junaedi (2017 : 374) mengatakan bahwa, pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses- proses.

Sama halnya dengan pendapat tersebut, menurut Robertson (2020 : 76) pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja organisasi sesungguhnya merupakan pengukuran atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi (Handayani dan Hudaya, 2018 : 277).

Pengukuran kinerja organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi organisasi karena pengukuran kinerja diartikan sebagai usaha untuk menentukan strategi ke dalam tindakan pencapaian target tertentu (Moeheriono, 2020 : 134). Berdasarkan berbagai definisi pengukuran kinerja organisasi yang telah dikemukakan oleh para pakar tersebut, maka pengukuran kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil program organisasi dengan berpatokan pada tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan strategi organisasi secara berkelanjutan. Kinerja organisasi dapat diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan- tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Indikator Kinerja Organisasi

Kegiatan pengukuran kinerja organisasi merupakan aktivitas pengamatan hasil pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas pengukuran atau pengamatan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menggambarkan

kinerja organisasi. Kegiatan pengukuran kinerja organisasi yang bersifat objektif dapat dilakukan dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja organisasi.

Menurut Robertson (2020 : 122) mendefinisikan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan pendapat dari Mardiasmo (2017 : 152) mengatakan bahwa, indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman padatarget-target dan tujuan organisasi.

Menurut Moeheriono (2020 : 74) indikator kinerja (*perfomarmance indicator*) di defenisikan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja sebagai nilai atau karekteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur *Output* atau *Outcome* suatu kegiatan.
2. Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
3. Sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
4. Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Perempuan

Menurut Suriani (2019 : 104) mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di semua bidang pembangunan. Sedangkan menurut Zakiyah (2016: 44) mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (P2BKKBN), mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai serangkaian upaya perempuan untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskan serta mengontrol sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri

untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Kementerian P2BKKBN, 2014). Berdasarkan berbagai definisi tersebut, pemberdayaan perempuan dapat didefinisikan sebagai proses yang ditujukan untuk meningkatkan dan menyetarakan peran perempuan agar dapat berperan aktif di setiap bidang pembangunan, sehingga perempuan dapat secara mandiri mewujudkan kesejahteraan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Menurut Sumodiningrat (2017 : 78) mengatakan bahwa, dalam upaya memberdayakan perempuan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya
2. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki perempuan (*empowering*). Diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah, dikarenakan yang lemah kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasarsifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja PKK Kelurahan Mande dalam pemberdayaan perempuan. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai tempat pengambilan data penelitian yang berkaitan dengan Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Mande. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan Juli 2023. Populasi dalam penelitian adalah pengurus dan anggota PKK

Kelurahan Mande yang berjumlah sebanyak 27 orang, terdiri dari pengurus sebanyak 14 orang dan anggota sebanyak 21 orang. Dan Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mande yang berjumlah 35 orang. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) butir pertanyaan yang berbentuk positif (*favorable*). Setiap butir pertanyaan terdiri dari 4 (empat) pilihan jawaban yang membentuk skala likert. Penggunaan skala likert dengan 4 (empat) pilihan jawaban dalam penelitian digunakan untuk mengukur jawaban atau respon setiap responden terhadap butir pertanyaan tentang kinerja organisasi PKK Kelurahan Mande. Setiap pilihan jawaban yang dipilih responden memiliki nilai dalam bentuk angka atau numberik, yaitu: a) Tidak Pernah (TP) bernilai 1; b) Pernah (P) bernilai 2; c) Kadang-kadang (K) bernilai 3; dan d) Selalu (S) bernilai 4.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kelompok Kerja (Pokja I) PKK Kelurahan Mande

Penjelasan mengenai kinerja kelompok Pokja I dalam mengimplementasikan program kerja penghayatan dan pengamalan pancasila dengan sangat baik, dapat diperjelas melalui hasil wawancara peneliti dengan Ketua PKK dan Anggota Pokja I PKK Kelurahan Mande. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Eri Murniasih, S.Kep,Ners sebagai Ketua PKK Kelurahan Mande berkaitan dengan implementasi program kerja penghayatan dan pengamalan pancasila, mengatakan bahwa: “Kami bersama dengan anggota selalu bergerak dalam bidang keagamaan. Pengurus dan anggota PKK selalu berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk mensukseskan kegiatan keagamaan dan syiar islam. Beberapa hal yang kami lakukan seperti: Kegiatan Majelis Taqlim dan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023). Berdasarkan jawaban dari Ketua PKK Kelurahan Mande menjelaskan bahwa pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mande dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja I) selalu berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk mensukseskan kegiatan keagamaan yang merupakan bentuk implementasi program kerja penghayatan dan pengamalan pancasila

Mengimplementasikan Program Kerja Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Hidup Berkoperasi

Penjelasan mengenai kinerja kelompok Pokja II dalam mengimplementasikan program kerja pendidikan keterampilan dengan sangat baik, dapat diperjelas melalui hasil wawancara peneliti dengan Ketua PKK dan Anggota Pokja II PKK Kelurahan Mande. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Eri Murniasih, S.Kep,Ners sebagai Ketua PKK Kelurahan Mande berkaitan dengan implementasi program kerja pendidikan keterampilan, mengatakan bahwa:

“Para anggota selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh PKK Kelurahan Mande bersama dengan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun. Materi pelatihan yang diberikan yaitu berupa keterampilan membuat kue dan jajan serta keterampilan menjahit pakaian”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023). Berdasarkan jawaban dari Ketua PKK Kelurahan Mande menjelaskan bahwa pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mande selalu berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan dua kali dalam setahun oleh PKK Kelurahan Mande bersama dengan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima.

Mengimplementasikan Sandang, Pangan, dan Tata Laksana Rumah Tangga

Penjelasan mengenai kinerja kelompok Pokja III dalam mengimplementasikan program kerja sandang yang kurang terlaksana, dapat diperoleh penjelasannya melalui hasil wawancara peneliti dengan Ketua PKK dan Anggota Pokja III PKK Kelurahan Mande. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Eri Murniasih, S.Kep,Ners sebagai Ketua PKK Kelurahan Mande berkaitan dengan implementasi program sandang, mengatakan bahwa: “Mengenai program kerja sandang atau tata busana, kami mengadakan kegiatan pelatihan menjahit bersama dengan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima. Sampai saat ini kami belum mampu mendirikan kelompok usaha produksi pakaian berskala kecil menengah atau UMKM, karena belum tersedianya modal. Dan kami juga mengingat kondisi anggaran PKK yang terbatas”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023) Berdasarkan pernyataan dari Ketua PKK Kelurahan Mande menjelaskan bahwa implementasi program kerja sandang yang dilaksanakan oleh pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mande masih terdapat kekurangan. Pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mande hanya sebatas melaksanakan pelatihan menjahit saja, tanpa adanya penerapan yang lebih mengarah terhadap terbentuknya kegiatan usaha produksi berskala mikro. Hal ini disebabkan kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh PKK Kelurahan Mande.

Mengimplementasikan Program Kerja Kesehatan, Kelestarian Lingkungan, dan Perencanaan Hidup Sehat.

Penjelasan tentang kinerja kelompok Pokja IV dalam mengimplementasikan program kerja kesehatan dengan sangat baik, dapat diperjelas melalui hasil wawancara peneliti dengan Ketua PKK dan Anggota Pokja IV PKK Kelurahan Mande. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Eri Murniasih, S.Kep,Ners sebagai Ketua PKK Kelurahan Mande berkaitan dengan implementasi program kerja kesehatan, mengatakan bahwa: “Pengurus dan anggota PKK turut terlibat dan memiliki peran dalam kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesehatan

di Kelurahan Mandé. Seperti dengan menjadi Kader Posyandu. Dimana dalam kegiatan tersebut para anggota bertugas untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan makanan gizi seimbang, kesehatan reproduksi dan KB, serta pencegahan penyakit menular". (Hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023). Berdasarkan jawaban dari Ketua PKK Kelurahan Mandé menjelaskan bahwa pengurus dan anggota PKK Kelurahan Mandé selalu berperan aktif dalam mengikuti yang berkaitan dengan kesehatan dengan berpartisipasi menjadi Kader Posyandu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja Kelompok Kerja (Pokja I) dalam mengimplementasi program kerja penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong-royong dapat terlaksana dengan sangat baik, karena hasil dari nilai kriteria di setiap responden sudah memenuhi syarat untuk kategori sangat baik. Kinerja Pokja II PKK Kelurahan Mandé dalam implementasi program kerja pendidikan keterampilan terlaksana dengan sangat baik karena hasil dari nilai kriteria di setiap responden sudah memenuhi syarat untuk kategori sangat baik dan program kerja pengembangan hidup berkoperasi yang tidak dapat terlaksana karena total nilai kriteria hanya memenuhi kategori tidak terlaksana. Kinerja Pokja III PKK Kelurahan Mandé dalam implementasi program kerja pangan terlaksana dengan sangat baik karena hasil dari nilai kriteria di setiap responden sudah memenuhi syarat untuk kategori sangat baik sedangkan program kerja sandang dan tata laksana rumah tangga kurang terlaksana karena total nilai kriteria hanya memenuhi kategori kurang terlaksana.

DAFTAR REFERENSI

- Azwar, S. (2016). Reliabilitas dan validitas (Edisi keempat). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian. (2016). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BPS Kota Bima. (2020). Angka laju penduduk Kota Bima 2018. Kota Bima: Badan Pusat Statistik Kota Bima.
- Dewi, N. (2019). Penilaian kinerja berdasarkan keuangan dan non-keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7(3), 761–777.
- Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: JICA dan Gajah Mada University Press.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS versi 24. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Gobel, L. V. (2016). Kinerja pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo, 2(1), 103–111.
- Handayani, L., & Hudaya. (2018). Sistem pengukuran kinerja perusahaan (Studi kasus pada Kantor Cabang Madu Nusantara Solo). Jurnal TEKNOIN, 7(4), 147–158.
- Harahap, J., & Rizal, F. (2019). Peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam pemberdayaan wanita di Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pengabdian Masyarakat. Medan: Program Studi Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Herri, et al. (2019). Implementasi model pengembangan entrepreneur perempuan muda pada rumah tangga miskin di Sumatra Barat. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Ismiyarto. (2017). Penilaian kinerja unit pelayanan pada organisasi publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 2(2), 45–57.
- Junaedi, A. (2017). Pengaruh kepemimpinan modal kepemimpinan transformasi terhadap semangat kerja (Skripsi). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Malang.
- Kementerian P2BKKBN. (2014). Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Mahmudi. (2018). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan (Edisi revisi). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moehariono. (2020). Pengukuran kinerja berbasis kompetensi. Bogor: Ghalia.
- Mulyadi. (2017). Balanced scorecard: Alat manajemen kontemporer untuk pelipatgandaan kinerja keuangan perusahaan (Edisi pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- Mustopadadja, A. R. (2020). Manajemen proses kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Pasolong, H. (2018). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
- Pinky, S. (2017). Lima tingkat pemberdayaan perempuan. Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, 4(1), 1–18.
- Robertson, G. (2020). Review kinerja. Lokakarya Review Kinerja. Jakarta: BPKP dan Executive Education.
- Sembiring, M. (2018). Budaya dan kinerja organisasi (Perspektif organisasi pemerintah). Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. (2017). Memahami metode penelitian kualitatif (Edisi kesatu). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2018). Metode partisipatoris dan upaya pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.